KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5383-7914-2380-0040

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526772/2019

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3. Provinsi	:	(19)	SULAWESI SELATAN
4. Kode/Nama Satker	:	(526772)	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG
Sebesar	:	Rp. 67.400.000	(ENAM PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp.	67.400.000
005.05.09.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	67.400.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	67.400.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 67.400.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:5383-7914-2380-0040

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Sri Muliati,S.Sos.,MH.
Bendahara Pengeluaran : Lisa Lusiana Farida,SH.,MH
Pejabat Penanda Tangan SPM : Ariyanto

1	Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			67.400.000
	Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			67.400.000
2	Program	005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)			67.400.000
	Sasaran Program	01	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
	Indikator Kinerja Program	01	Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang diselesaikan Tepat Waktu, Sidang keliling	3564	Perkara	
		02	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaiakan Tepat Waktu	2485	Perkara	
		03	Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	41	Perkara	
		04	Masyarakat Penerima Layanan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara	8640	Jam Layanan	
	Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
	Indikator Output Program	01	Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer Termasuk Penyelesaian Perkara Yang Kurang dari 5 (lima) bulan	3564	Perkara	
		02	Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	2485	Perkara	
		03	Perkara Yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	41	Perkara	
		04	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	8640	Jam Layanan	
	Kegiatan	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			67.400.000
	Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN			
		02	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN			
		03	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara			
		04	Tenaga Teknis yang kompeten di Bidang Hukum dan Administrasi d Lingkungan Peradilan TUN			
	Output Kegiatan	1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	94 Perkara		35.000.000
	Indikator Output Kegiatan	01	Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	2485	Perkara	
	Output Kegiatan	1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	1 Perkara		600.000
	Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Prodeo	41	Perkara	
	Output Kegiatan	1059.003	Pos Bantuan Hukum	288 Jam Layanan		31.800.000
	Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN	8640	Jam Layanan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2019
IA. INFORMASI KINERJA

DS:5383-7914-2380-0040

Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG	Kuasa Pengguna Anggaran	:	Sri Muliati,S.Sos.,MH.
Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Bendahara Pengeluaran	:	Lisa Lusiana Farida,SH.,MH
Provinsi	: (19)	SULAWESI SELATAN	Pejabat Penanda Tangan SPM	:	Ariyanto
Kode/Nama Satker	: (526772)	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG			

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.

Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2019

DS:5383-7914-2380-0040

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

			Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	67.400.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	67.400.000	(2) RPLN	US$ 0	Rp. 0
2. PNBP	Rp.	0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	(2) RHLN	US$ 0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2019

DS:5383-7914-2380-0040

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526772	**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG**	**-**	**67.400**	**-**	**-**	**-**	**67.400**		
005.05.09	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)**	**-**	**67.400**	**-**	**-**	**-**	**67.400**		
1059	**Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara**	**-**	**67.400**	**-**	**-**	**-**	**67.400**		
1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	-	35.000	-	-	-	35.000	19 . 51	
01	RM	-	35.000	-	-	-	35.000	136	
1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	-	600	-	-	-	600	19 . 51	
01	RM	-	600	-	-	-	600	136	
1059.003	Pos Bantuan Hukum	-	31.800	-	-	-	31.800	19 . 51	
01	RM	-	31.800	-	-	-	31.800	136	
	JUMLAH	**-**	**67.400**	**-**	**-**	**-**	**67.400**		

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.

Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.

-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5383-7914-2380-0040

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**526772**	**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	620	1.375	2.413	3.694	3.882	4.314	7.488	7.286	7.899	8.061	9.025	11.343	67.400
		52 BELANJA BARANG	620	1.375	2.413	3.694	3.882	4.314	7.488	7.286	7.899	8.061	9.025	11.343	67.400
	005.05.09.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	620	1.375	2.413	3.694	3.882	4.314	7.488	7.286	7.899	8.061	9.025	11.343	67.400
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	620	1.375	2.413	3.694	3.882	4.314	7.488	7.286	7.899	8.061	9.025	11.343	67.400
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.274	15.310
		- PNBP (425232)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
		- PNBP (425233)	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	999	12.010
		- PNBP (425239)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2019
IV A. B L O K I R

DS:5383-7914-2380-0040

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [526772] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2019
IV B. C A T A T A N

DS:5383-7914-2380-0040

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [526772] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
-